

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Tahap Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Alat Pengumpulan Data	31
6. Analisis Data	32

7. Lokasi Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH, TEORI HUKUM, HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	34
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
1. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	34
2. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	37
3. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	41
4. Kewajiban Kepala Daerah	45
5. Larangan Kepala Daerah.....	45
6. Kedudukan Kepala Daerah	47
B. Tinjauan Teori Hukum	
1. Teori Kewenangan	49
2. Teori Kepastian Hukum.....	52
3. Teori <i>Utilitarianisme</i>	54
4. Teori Hukum Pembangunan	55
C. Tinjauan Umum Tentang Hierarki Perundang-Undangan.....	57

D. Sistem Keolahragaan Nasional	62
1. Pengertian Sistem Keolahragaan Nasional	62
2. Dasar, Fungsi, Tujuan dan Prinsip Sistem Keolahragaan Nasional	63
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Sistem Keolahragaan Nasional	64
4. Ruang Lingkup Sistem Keolahragaan Nasional	65
5. Pengelolaan Keolahragaan.....	68
6. Sanksi Keolahragaan.....	70

**BAB III KEDUDUKAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA DAN FIFA.....72**

A. Profil Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia	
1. Sejarah PSSI.....	72
2. Dasar, Asas, dan Status PSSI.....	79
3. Tujuan dan Kewenangan PSSI.....	80
4. Persyaratan Tata Cara Menjadi Ketua PSSI	83
5. Badan Yudisial PSSI.....	84
B. Sejarah Dan Kedudukan FIFA Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	
1. Sejarah FIFA.....	86
2. Kedudukan FIFA Dalam Sistem Ketatanegaraan	91

C. Kedudukan PSSI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	93
D. Pelaksanaan Kedudukan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung	
1. Hasil Wawancara Dengan Wakil Bupati Kabupaten Bandung	97
2. Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Jendral Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat.....	102
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI KEDUDUKAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI KETUA PSSI KABUPATEN BANDUNG	104
A. Kedudukan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung Berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	104
B. Akibat Hukum Tidak Dijalankannya Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 Dalam Jabatannya	118

BAB V	PENUTUP	126
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		128
LAMPIRAN		